

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

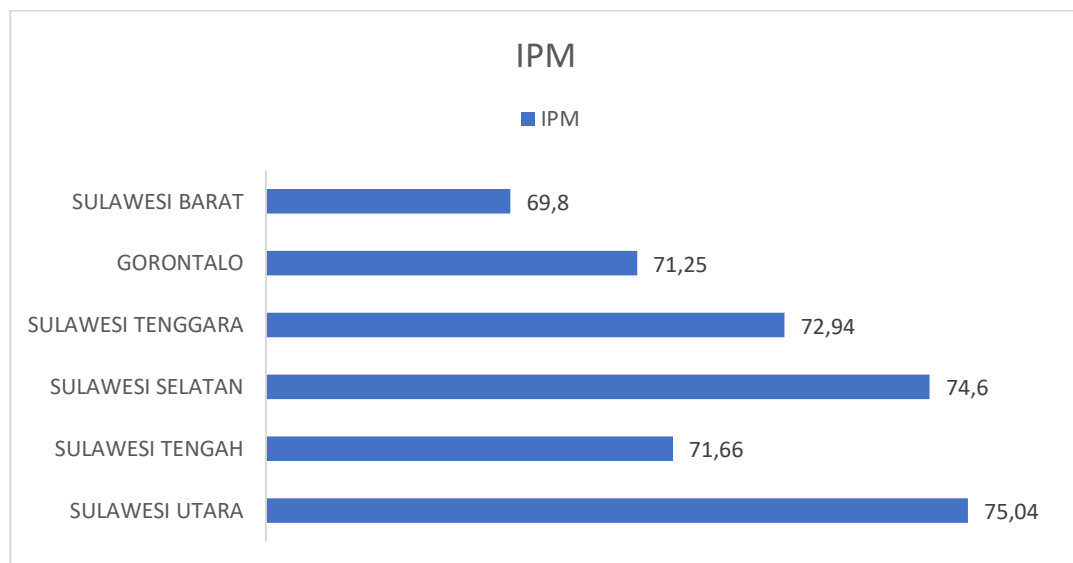
Pembangunan merupakan proses transformasi menuju masa depan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkelanjutan. Menurut Todaro & Smith, (2015), pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari sistem-sistem sosial dan ekonomi yang dimiliki. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari perubahan yang terjadi pada berbagai dimensi baik ekonomi maupun sosial. Paradigma pembangunan saat ini telah menempatkan pembangunan manusia sebagai tujuan atau fokus utama pembangunan (Mongan, 2019 ; Sumiyarti et al., 2022). Pembangunan ekonomi yang awalnya memandang keberhasilan pembangunan suatu wilayah dengan ukuran tingginya pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat menunjukkan kemajuan, namun pendekatan ini sering kali mengabaikan masalah ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, dan keberlanjutan lingkungan. Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran peningkatan mutu SDM atau pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia memiliki makna sebagai proses dan memperoleh meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian pendidikan dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara (Jhingan, 2016).

Pembangunan manusia memposisikan manusia sebagai asset bangsa yang sesungguhnya dan menciptakan pertumbuhan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan manusia adalah mampu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (Human Development Report, 1990). Kualitas sumber daya manusia yang tersedia merupakan indikator yang baik untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Cerminkan sumber daya manusia yang berkualitas bisa dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari segala usia, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional dan nasional. United Nation Development Programme (UNDP) mengukur kualitas modal manusia di suatu negara dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau sering disebut dengan Human Development Index (HDI).

Indonesia saat masih dihadapkan pada masalah yang sangat serius, yaitu kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 15 November 2024 lalu, IPM Indonesia selama 2020-2024 rata-rata meningkat sebesar 0.75 persen per tahun dengan 74,20 Poin pada tahun 2024 . Dalam Human Development Report 2023/2024 yang dirilis United Nations Development Programme (UNDP) IPM Indonesia berada di angka 112 dunia. Persis di bawah Palestina, Afrika Selatan, Lebanon, Mesir, hingga Vietnam. Pada skala Asia, Indonesia berada di urutan ke-18. Sementara skala Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-6, di atasnya Filipina, di bawahnya Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura.

Sementara itu beberapa provinsi di Indonesia memiliki IPM yang masih berada dibawah rata-rata nasional. Provinsi di Indonesia memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang paling rendah adalah provinsi kepulauan riau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0.49 persen dan yang paling tinggi adalah provinsi Sulawesi selatan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 1,52 persen, hal ini dapat disimpulkan bahwa persebaran persentase IPM di Indonesia belum maskimal. Meskipun IPM Indonesia secara keseluruhan meningkat, namun yang menjadi masalah adalah perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara beberapa provinsi di Indonesia, maka Indonesia masih perlu meningkatkan IPM.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

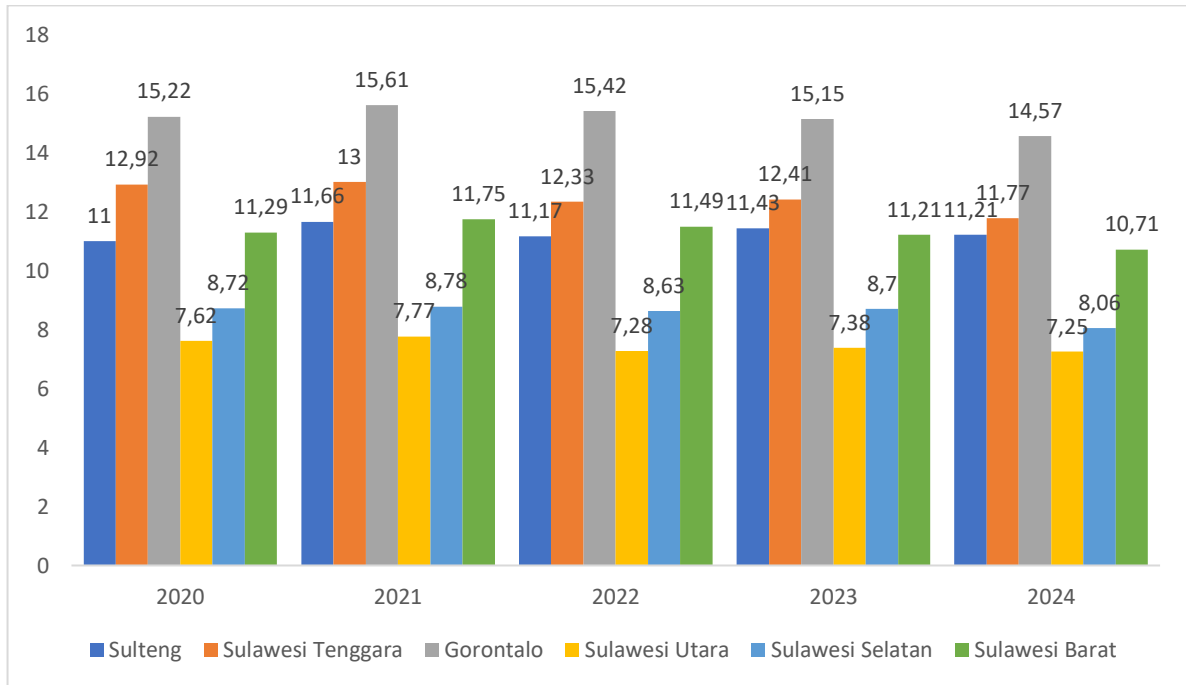
Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Setiap Provinsi Di Pulau Sulawesi Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa data Indeks Pembangunan di Pulau Sulawesi masih tergolong rendah, di mana yang paling rendah yakni Sulawesi Barat dengan nilai IPM 69,8 yang masih dalam kategori sedang sedangkan yang paling tinggi yakni Sulawesi Utara dengan nilai IPM 75,04. Jika dibandingkan dengan

rata-rata nilai IPM Indonesia yakni 74,39 pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa hanya dua Provinsi yang berada di atas rata-rata IPM Nasional yakni hanya Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, sedangkan provinsi lainnya masih berada di bawah rata-rata IPM Nasional.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi barometer penting untuk mengukur capaian pembangunan manusia di Pulau Sulawesi. Namun, meningkatkan IPM di Sulawesi bukanlah perkara mudah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak penduduk miskin di beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. Tingginya angka kemiskinan di Sulawesi masih menjadi tantangan yang kompleks, mengingat kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Salah satu peran krusial yang dapat dimainkan oleh pemerintah adalah melalui alokasi belanja pemerintah yang diarahkan pada program-program pengentasan kemiskinan. Investasi pemerintah pada sektor-sektor kunci, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong penurunan angka kemiskinan di Sulawesi.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Presentase Kemiskinan pada Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2020-2024

Gambar diatas memperlihatkan angka kemiskinan di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo, mencatat angka kemiskinan yang cukup tinggi, berkisar di atas 15% selama kurun waktu 2020-2024. Sementara itu, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat juga menunjukkan tren kemiskinan yang cenderung stabil, namun masih berada pada level yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi serupa juga terlihat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, meskipun dengan fluktuasi yang sedikit lebih rendah Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan yang kompleks, mengingat kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial,

kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis dan terintegrasi untuk dapat mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk berbagai sektor pembangunan. Belanja pemerintah di bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Alokasi untuk sektor kesehatan ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Di bidang pendidikan, anggaran diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sedangkan belanja infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Menurut Mangkoesoebroto (2016), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang menetapkan suatu kebijakan tertentu memiliki konsekuensi biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tersebut didanai dari anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran bagi pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu bidang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap permasalahan pada bidang tersebut. Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk belanja fungsi daerah yang merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Belanja ini meliputi berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial.

Pertama, Alokasi belanja pemerintah di sektor kesehatan memiliki kaitan terhadap IPM. Investasi dalam bidang kesehatan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetapi juga berkontribusi pada penurunan angka kematian dan peningkatan kualitas hidup. Pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta program-program preventif dan promotif, dapat menurunkan risiko penyakit dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Dalam beberapa kasus, kurangnya akses layanan kesehatan yang berkualitas berpotensi menjadi hambatan bagi peningkatan IPM. Belanja pemerintah pada bidang kesehatan berkaitan dengan besarnya pengeluaran pemerintah dari total APBD yang dialokasikan dalam membiayai pemenuhan di sektor kesehatan. Anggaran kesehatan yang semakin besar anggaran pemerintah di bidang kesehatan maka dapat berpengaruh secara langsung terhadap indeks pembangunan manusia. Alokasi dana yang tepat dalam sektor kesehatan juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Misalnya, program bantuan sosial yang terarah dan efisien dapat membantu masyarakat yang rentan, sehingga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup (Santoso, 2024).

Kedua, alokasi belanja pendidikan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota di bidang pendidikan. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan

dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Tujuan dan manfaat belanja pada fungsi pendidikan telah banyak dikemukakan oleh para peneliti yang meneliti tentang belanja pendidikan. Pada akhirnya akan diungkapkan bahwa belanja pendidikan akan meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia.

Belanja pada bidang pendidikan menurut Atmanti, (2005) dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena pengeluaran ini merupakan komitmen pemerintah dalam investasi pembangunan sumber daya manusia. Investasi ini lebih lanjut dikenal dengan istilah pembentukan modal manusia (*human capital*). *Human capital* menjelaskan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu faktor produksi yang paling penting selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. menjelaskan bahwa sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah (Muhammad Ade Fajar & Lili Indrawati, 2020).

Teori yang dikemukakan oleh Schultz dan Becker menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas individu. Ketika masyarakat mendapatkan pendidikan yang baik, mereka menjadi lebih terampil dan mampu melakukan pekerjaan yang lebih kompleks, yang berujung pada peningkatan output dan efisiensi kerja. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kenaikan produktivitas individu

berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, lebih banyak lapangan kerja tercipta dan pendapatan per kapita meningkat. Pendapatan yang lebih tinggi bukan hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional, yang pada akhirnya berpengaruh positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Ketiga, Belanja bidang Infrastruktur merupakan belanja perumahan dan fasilitas umum menurut Prasetyo (2017) adalah penyediaan layanan pada sektor perumahan dan fasilitas umum yang cukup dominan berpengaruh dalam pembangunan ekonomi. Penyediaan layanan tersebut akan menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan yang terjadi. Tujuan sekaligus manfaat yang dapat dirasakan dari belanja pemerintah bidang infrastruktur seperti yang dijelaskan oleh Bappenas (2003) adalah ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan nasional.

Keempat belanja fungsi ekonomi merupakan belanja pemerintah yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti melalui bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Ketika masyarakat memiliki pendapatan yang lebih baik, mereka akan lebih mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, yang berkontribusi pada peningkatan IPM secara keseluruhan. Menurut Todaro, sumber daya manusia adalah modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik serta sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif, manusialah yang merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial ekonomi serta politik dan melaksanakan pembangunan nasional.

Komponen ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap standar kehidupan, yang merupakan salah satu dimensi dalam perhitungan IPM. Peningkatan pendapatan per kapita, sebagai indikator kemakmuran ekonomi, secara langsung akan meningkatkan skor pada dimensi standar hidup dalam IPM. Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap barang dan jasa yang menunjang kualitas hidup.

Secara umum belanja pemerintah memiliki Pengeluaran pemerintah dan Investasi untuk pembangunan manusia melalui penyediaan pelayanan dasar akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi warganya dengan menyediakan pelayanan dasar guna memenuhi hak-hak penduduknya. Pelayanan

dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan akan mempunyai pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia khususnya di Pulau Sulawesi.

Pulau Sulawesi, dengan enam provinsinya yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beragam, menghadapi tantangan yang kompleks terkait dengan kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat. Selama lima hingga sepuluh tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam Anggaran Belanja Pembangunan pada APBD Provinsi, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Peningkatan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memajukan pembangunan, namun hasilnya belum merata di semua provinsi. Beberapa provinsi masih menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi dan IPM yang rendah, yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan. Fenomena ini saling mempengaruhi antar provinsi, di mana daerah dengan IPM rendah cenderung mengalami kesulitan dalam menarik investasi dan meraih pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Dengan menganalisis determinan sektor-sektor yang mempengaruhi kemiskinan dan IPM, dapat identifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap kondisi ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan IPM di Pulau Sulawesi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara sektor sektor yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia sehingga diharapkan alokasi anggaran dapat diarahkan dengan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap investasi membawa dampak positif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya sekadar analisis akademik, tetapi juga merupakan panduan strategis untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan di Pulau Sulawesi, yang pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Melalui pendekatan komparatif antar provinsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih efektif dan terarah dalam suatu kawasan khususnya di pulau Sulawesi, dengan memahami perbedaan dan tantangan yang dihadapi setiap provinsi, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan berpotensi meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di seluruh Sulawesi. Sehingga peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Determinan Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Pulau Sulawesi Pada Tahun 2018-2024”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Belanja Fungsi Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung maupun tidak langsung?
2. Apakah Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh terhadap Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung maupun tidak langsung?
3. Apakah Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh terhadap Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung maupun tidak langsung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Fungsi pendidikan terhadap Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung maupun tidak langsung.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Fungsi kesehatan terhadap Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung maupun tidak langsung.
3. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Fungsi ekonomi terhadap Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung maupun tidak langsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengambil kebijakan dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu evaluasi kinerja makroekonomi di Indonesia dengan variabel-variabel yang telah ditentukan pada rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pengertian indeks pembangunan manusia diklasifikasikan oleh lembaga UNDP (United Nation Development Program) sebagai “ Suatu proses untuk memperluas berbagai macam pilihan bagi penduduk”. Dengan demikian, IPM merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. United Nations Development Program (UNDP) telah menerbitkan laporan pembangunan sumber daya insani dalam satuan kuantitatis yang disebut dengan Human Development Indeks (HDI). Komponen indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri disusun dari tiga komponen (BPS : 2014) yakni “ Lamanya hidup , yang diukur dari harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan , yang di dapat dengan memadukan antara angka melek huruf pada usia dewasa dengan bobot 2/3 dan rata - rata lamanya bersekolah yang ditempuh dengan bobot 1/3 dan tingkat kehidupan yang layak, ditinjau dari pengeluaran perkapita yang telah di sesuaikan (PPP Rupiah).

Badan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) menetapkan kriteria pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). HDI berfokus untuk mengungkapkan lebih sensitive daripada sekadar melihat pendapatan per kapitanya sebagai ukuran untuk menilai pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia dapat menilai pembangunan suatu wilayah sebagai akibat dari (Izzah, 2015):

1. IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia.
2. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan.
3. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat.
4. Meskipun menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini merupakan satu - satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

Indikator yang digunakan untuk mengukur IPM didasarkan pada komponen utama kualitas hidup terdiri atas: harapan hidup, tingkat melek huruf, rata - rata lama sekolah, dan kondisi hidup yang layak. Penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0 sampai dengan 0,10 yang terdiri dari (Kuncoro, 2009): Kategori rendah : nilai IPM 0 – 0,05 Kategori menengah : nilai IPM antara 0,51 – 0,79 Kategori tinggi: nilai IPM 0,8 – 1 IPM digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kualitas hidup manusia dan) berfungsi untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata - rata lama sekolah dan harapan lama sekolah

merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. (BPS, Indeks Pembangunan Manusia 2018, 2018).

2.1.2 Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (proverty line) atau disebut juga batas kemiskinan (poverty treshold).

Bappenas (2018) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hak-hak dasarnya berupa makanan, perumahan, Pendidikan, air bersih, Kesehatan, pekerjaan, pertanahan, sumber daya alam, sumber daya lingkungan, terbebas dari kriminalisme, dan hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial guna mengembangkan serta mempertahankan kehidupan yang lebih baik.

Todaro & Smith (2015), mengatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan diperlukan bukan hanya satu atau dua kebijakan yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan suatu paket kebijakan yang akan saling melengkapi satu sama lain, yang meliputi empat unsur pokok, yaitu: (i) kebijakan yang ditujukan untuk menghilangkan distorsi-distorsi harga faktor; (ii) kebijakan yang dimaksudkan untuk tercapainya perubahan struktural di dalam distribusi asset, kekuasaan, dan akses pendidikan, yang disertai dengan kesempatan-kesempatan untuk memperoleh penghasilan; (iii) kebijakan yang

dimaksudkan untuk memperbaiki distribusi pendapatan: untuk golongan ekonomi kuat ditempuh melalui kebijakan perpajakan atas pendapatan dan kekayaan mereka, sedangkan untuk golongan ekonomi lemah ditempuh melalui penyediaan tunjangan finansial serta barang dan jasa konsumsi; dan (iv) kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pengembangan teknologi tepat guna dan pembangunan yang menekankan pada penyediaan fasilitas perawatan. kesehatan, perumahan, pelatihan yang murah, perbaikan sarana pertanian, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Bigsten & Levin (2000) juga menyatakan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pertumbuhan kemungkinan besar juga akan berhasil dalam menurunkan kemiskinan apabila terdapat dukungan kebijakan dan lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) yang tepat. David Dollar & Aart Kraay (2001) juga menegaskan hal serupa bahwa pertumbuhan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi si-miskin jika pertumbuhan disertai dengan kebijakan penegakan hukum, disiplin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan internasional, dan strategi pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan menurut Louis-Marie (2015) merupakan permasalahan yang mengandung berbagai bentuk ketidakadilan, yang mana adalah sebuah sumber dari pencegahan sosial di dalam pendistribusian kondisi kehidupan yang esensial bagi martabat manusia. Kondisi-kondisi kehidupan ini sesuai dengan kapabilitas individu, rumah tangga dan komunitas untuk memberikan akses terhadap kebutuhan dasar mereka dalam di dimensi sebagai berikut: (1) pendapatan; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) makanan/nutrisi; (5) air bersih/sanitasi; (6) pekerjaan; (7) perumahan; 8) akses terhadap aset produktif; (9) akses terhadap pasar; dan (10) partisipasi di dalam komunitas. Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning, bahwa

seseorang dikatakan miskin bila mengalami “capability deprivation” dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan (Amartya zen).

Bank Dunia (2004) secara operasional mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tempat tinggal, sakit yang tidak mampu untuk berobat, ketiadaan akses ke sekolah dan ketidakmampuan membaca, tidak adanya pekerjaan dan kekhawatiran akan kehidupan dimasa yang akan datang, sanitasi yang buruk, serta ketidakberdayaan dan kebebasan dalam politik. Sedangkan definisi kemiskinan yang digunakan di Indonesia utamanya dalam mengukur kemiskinan yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan dasar makanan (2100 kkal/kapita/hari) maupun kebutuhan dasar non-makanan. Menurut (Oscar. Lewis, 1959) dalam teori budaya kemiskinan diungkapkan bahwa sifat yang dimiliki penduduk miskin antara lain menarik diri dari lingkungan sosial atau “minder” sehingga sangat susah untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kemiskinan cultural, menurut Lewis faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar menyebabkan semakin parahnya tingkat kemiskinan atau dengan kata lain kemiskinan kemiskinan dapat disebabkan karena kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan struktural yakni situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya

kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan terkadang justru semakin memperdalam tingkat kemiskinan, contoh kebijakan bantuan ekonomi kecil dan menengah dengan menerapkan berbagai persyaratan yang mustahil bisa dipenuhi oleh kelompok sasaran.

2.1.3 Teori Modal Manusia

Teori modal manusia yang dikemukakan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai komponen fundamental dalam meningkatkan produktivitas individu yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tinggi dapat dicapai melalui pendidikan yang memadai dan kesehatan yang baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas tenaga kerja.

Modal manusia, sebagai konsep yang diperkenalkan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker, menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas individu. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar tenaga kerja, tetapi juga membekali individu dengan kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Dengan demikian, individu yang menerima pendidikan yang baik akan lebih mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks dan meningkatkan efisiensi kerja mereka, yang secara langsung berdampak pada produktivitas.

Belanja pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan menjadi kunci dalam mewujudkan modal manusia yang berkualitas. Investasi yang memadai dalam pendidikan akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sehingga lebih banyak

individu dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan. Selain itu, belanja pemerintah pada layanan kesehatan yang berkualitas juga berkontribusi pada peningkatan status kesehatan masyarakat, yang penting untuk memastikan bahwa individu dapat bekerja dengan optimal. Ketika masyarakat sehat dan terdidik, produktivitas tenaga kerja meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menciptakan lingkaran positif di mana peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi angka kemiskinan.

Investasi dalam pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan karena keduanya berkontribusi pada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan indikator penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung investasi dalam pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas bagi pemerintah agar dapat mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.4 Belanja Pemerintah

Belanja pemerintah adalah area penting dalam ekonomi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada

tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

Salah satu teori pengeluaran pemerintah yang paling terkenal adalah Keynesianisme, yang diperkenalkan oleh ekonom Inggris, John Maynard Keynes, pada tahun 1930-an. Teori ini menekankan peran penting pengeluaran pemerintah dalam merangsang aktivitas ekonomi, khususnya selama masa resesi atau depresi. Keynes berpendapat bahwa dalam situasi di mana ekonomi mengalami ketidakseimbangan, pasar sendiri tidak mampu menciptakan keseimbangan penuh. Dengan memperkuat permintaan agregat, Keynesianisme dapat membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Klasifikasi belanja pemerintah salah satunya adalah menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara (Badrudin, 2012). Permendagri No. 13 tahun 2006 mengatur pengelompokan anggaran belanja pemerintah daerah menjadi 11 fungsi, namun hanya 9 fungsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, meliputi: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi ketertiban dan keamanan; (3) fungsi ekonomi; (4) fungsi lingkungan hidup; (5) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (6) fungsi kesehatan; (7) fungsi pariwisata dan budaya; (8) fungsi pendidikan; dan (9) fungsi perlindungan sosial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengeluaran fungsi kesehatan adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk program kesehatan, yaitu pengeluaran untuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, keluarga

berencana, litbang kesehatan, dan kesehatan lainnya. Alokasi anggaran pemerintah untuk kesehatan diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171.

2.1.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen kunci dalam pembangunan manusia dan memainkan peran fundamental dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks ini, pendidikan diwakili melalui dua indikator utama: Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal.

Teori Modal Manusia yang dikemukakan oleh Schultz (1961) dan Becker (1962) menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktivitas individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan itu, penelitian Psacharopoulos dan Patrinos (2018) menemukan bahwa setiap tahun tambahan pendidikan berdampak pada peningkatan pendapatan individu sebesar 9% secara global. Hal ini menunjukkan hubungan positif antara RLS dan dimensi pendapatan dalam IPM.

Harapan Lama Sekolah (HLS) mencerminkan potensi pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Teori Pertumbuhan Endogen yang dikembangkan oleh Lucas (1988) dan Romer (1990) menekankan pentingnya akumulasi modal manusia, termasuk melalui pendidikan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. HLS yang tinggi mengindikasikan potensi pengembangan sumber daya manusia yang lebih besar di masa depan, yang dapat mendorong inovasi dan produktivitas.

Kedua indikator ini, RLS dan HLS, memiliki peran kunci dalam dimensi pengetahuan IPM. Menurut United Nations Development Program (UNDP, 2020), dimensi pengetahuan dalam IPM dihitung menggunakan kombinasi dari RLS dan HLS. Studi empiris di Indonesia oleh Arisman (2018) dan Purnama dkk. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan RLS dan HLS berdampak positif pada peningkatan IPM. Mekanisme pengaruh RLS dan HLS terhadap IPM dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, peningkatan produktivitas tenaga kerja akibat pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi pada dimensi pendapatan IPM. Kedua, pengetahuan kesehatan yang lebih baik dari individu berpendidikan tinggi dapat meningkatkan angka harapan hidup, yang merupakan komponen kesehatan dalam IPM. Ketiga, pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, yang mencerminkan aspek non-ekonomi dari pembangunan manusia. Keempat, masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih adaptif terhadap teknologi baru, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Komponen dalam mengukur dimensi pengetahuan melalui nilai HLS dan RLS. Komponen pengetahuan tersebut dapat ditinjau dari tingkat pendidikan. HLS dan RLS memiliki bobot yang sama dan dilakukan penggabungan dalam komponen pembentuk IPM. Pada kesehatan, komponen yang digunakan yakni direpresentasikan menggunakan umur harapan hidup. Menurut (Siskawati et al., 2021) harapan lama sekolah ialah perkiraan mengenai lamanya sekolah sekolah yang akan ditempuh oleh anak-anak pada masa datang. HLS dapat dihitung mulai dari penduduk yang berumur 7 tahun atau lebih.

Melalui HLS dapat ditunjukkan bahwa anak yang memiliki peluang untuk menempuh pendidikan formal yakni mulai dari umur 7 tahun (Sabrina et al., 2022).

2.1.3.2 Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator kunci dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat dan efektivitas kebijakan kesehatan di suatu wilayah. Teori Transisi Epidemiologi yang dikemukakan oleh Omran (1971) menjelaskan bahwa peningkatan AHH terjadi seiring dengan perubahan pola penyakit dan kematian dalam suatu populasi, yang dapat didorong oleh perbaikan kondisi sosial-ekonomi, sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Dalam konteks IPM, AHH memiliki peran penting dalam dimensi kesehatan. United Nations Development Program (UNDP, 2020) menggunakan AHH sebagai indikator tunggal untuk mengukur dimensi kesehatan dalam perhitungan IPM. Studi empiris oleh Sharma (2018) dan Frączkiewicz-Wronka et al. (2021) telah mengkonfirmasi bahwa peningkatan AHH berdampak positif pada peningkatan IPM di berbagai negara.

Mekanisme pengaruh AHH terhadap IPM dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Pertama, AHH yang lebih tinggi menunjukkan populasi yang lebih sehat dan berpotensi produktif untuk waktu yang lebih lama, yang berkontribusi pada dimensi pendapatan dalam IPM. Kedua, individu dengan harapan hidup yang lebih panjang memiliki insentif lebih besar untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kualitas modal manusia secara keseluruhan. Ketiga, masyarakat dengan AHH yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat tabungan yang lebih tinggi, yang dapat dialokasikan untuk investasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Keempat, AHH yang lebih tinggi umumnya mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik, yang merupakan aspek penting dari pembangunan manusia.

Selain itu, AHH juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak berdampak langsung pada IPM, seperti akses ke layanan kesehatan, nutrisi, kondisi lingkungan, serta faktor sosial-ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan AHH memerlukan pendekatan multidimensi yang mencakup investasi dalam infrastruktur kesehatan, program kesehatan preventif, kebijakan sosial-ekonomi, serta perbaikan lingkungan.

Sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan manusia, peningkatan AHH harus menjadi prioritas dalam strategi pembangunan nasional dan daerah. Dengan memahami pentingnya AHH dalam IPM, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan nilai IPM, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan di masa depan.

2.1.3.3 Ekonomi

Menurut Todaro (2011), perumusan pembangunan manusia sebagai perluasan yang lebih baik terutama pada pemberdayaan peningkatan kemampuan dasar sehingga dapat berpartisipasi pada segala sektor pembangunan. Diantara berbagai opsi, yang terpenting ialah pengetahuan, umur panjang dan kesehatan, serta mempunyai akses sumber daya yang diperlukan agar dapat hidup dengan layak

Menurut Squire (1999), adanya hubungan antara pendapatan produktif dengan IPM, penentu utama pada pembangunan manusia ialah pendapatan. Partisipasi dari orang miskin dalam penggunaan tenaganya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan

akibat dari kurangnya gizi dan kesehatan, serta pendidikan yang minim dapat mengurangi kemampuan dalam bekerja. Akibat dari IPM yang rendah membuat orang miskin tidak mendapatkan kesempatan dalam profit dari penghasilan yang produktif karena adanya pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator penting dalam dimensi ekonomi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa teori dan studi empiris telah mengungkap bagaimana pendapatan per kapita mempengaruhi pencapaian IPM di berbagai negara dan daerah. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menekankan bahwa peningkatan produktivitas dan akumulasi modal akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks IPM, peningkatan pendapatan per kapita yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada peningkatan dimensi standar hidup yang menjadi komponen IPM. Selain itu, Teori Ekonomi Pembangunan yang dikembangkan oleh para ekonom seperti Rostow, Nurske, dan Lewis menyoroti pentingnya transformasi struktural dalam perekonomian untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Piętak, Łukasz. 2014).

. Proses ini melibatkan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern yang lebih produktif, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita dan standar hidup masyarakat.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pendidikan yang direpresentasikan melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kita dapat melihat betapa mendasarnya peran pendidikan dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat memberikan kontribusi penting dalam beberapa aspek. Pertama, pendidikan yang lebih baik meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu. Dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar tenaga kerja. Hal ini secara langsung berdampak positif pada dimensi pendapatan dalam IPM. Kedua, pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat. Individu dengan tingkat pendidikan yang memadai cenderung memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam komponen IPM terkait dimensi standar hidup. Lebih jauh lagi, pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Masyarakat yang terdidik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan mengembangkan solusi baru untuk tantangan pembangunan. Oleh karena itu, investasi dalam sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di seluruh lapisan masyarakat akan memberikan fondasi yang kokoh bagi

pembangunan manusia yang holistik dan berkelanjutan. Dengan semakin tingginya capaian pendidikan, kita dapat

2.2.2 Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Kesehatan yang direpresentasikan melalui Angka Harapan Hidup (AHH), memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi kesehatan masyarakat yang baik merupakan pilar fundamental bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ketika masyarakat memiliki status kesehatan yang lebih baik, hal ini berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan. Pertama, individu yang sehat cenderung memiliki produktivitas yang lebih tinggi dalam bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Mereka dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Kedua, masyarakat yang lebih sehat juga memiliki peluang hidup yang lebih baik. Dengan Angka Harapan Hidup yang lebih tinggi, mereka dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan selama periode hidup yang lebih panjang. Hal ini secara langsung berkontribusi pada dimensi kesehatan dan standar hidup dalam IPM. Lebih luas lagi, kesehatan masyarakat yang baik dapat menciptakan efek positif pada berbagai aspek pembangunan manusia. Individu yang sehat dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Pada gilirannya, masyarakat yang sehat dan terdidik akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam sektor kesehatan harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, akan memberikan fondasi

yang kokoh bagi pembangunan manusia yang holistik. Dengan semakin tingginya pencapaian kesehatan masyarakat, kita dapat melihat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang signifikan di masa depan

2.2.3 Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Faktor ekonomi yang dapat diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau pengeluaran per kapita, mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi perekonomian yang semakin baik di masyarakat berperan sebagai katalisator bagi pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika kondisi ekonomi masyarakat membaik, hal ini memberikan dampak positif yang luas. Pertama, peningkatan pendapatan per kapita memungkinkan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat dapat membiayai biaya sekolah, membeli buku, serta memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan lebih baik. Hal ini secara langsung berkontribusi pada dimensi pengetahuan dan kesehatan dalam IPM.

Kedua, peningkatan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi yang membaik, mendorong perbaikan taraf hidup. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, memiliki tempat tinggal yang layak, dan mengakses gizi yang memadai. Pada gilirannya, hal ini akan meningkatkan dimensi standar hidup dalam IPM. Lebih luas lagi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh pekerjaan yang layak, hal ini akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa peningkatan ekonomi saja tidak cukup. Dibutuhkan pula

investasi yang seimbang dalam sektor-sektor sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, agar pembangunan manusia dapat tercapai secara komprehensif. Sinergi antara kemajuan ekonomi dan perbaikan akses terhadap layanan dasar merupakan kunci untuk mewujudkan IPM yang tinggi dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dibarengi dengan peningkatan investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, akan menjadi katalisator yang efektif bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

2.3 Tinjauan Empiris

Dwi Rahayu Hidayati dan Niniek Imaningsih (2021) meneliti tentang Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia . menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan secara parsial pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak signifikan indeks pembangunan manusia pada Provinsi D.I. Yogyakarta. Pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada Provinsi D.I. Yogyakarta. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Psacharopoulos & Patrinos (2018) Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahun tambahan pendidikan meningkatkan pendapatan individu sebesar 9% secara global. Pendidikan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kompetensi tenaga kerja, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih baik, sehingga mendorong peningkatan dimensi pengetahuan dan ekonomi dalam IPM.

Sharma (2018) Studi ini menemukan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di berbagai negara. Masyarakat yang lebih sehat memiliki peluang lebih besar untuk produktif, meningkatkan pendapatan, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka.

Melliana & Zain (2013) Studi ini menemukan bahwa AHH memiliki korelasi positif dengan IPM di Jawa Timur. Perbaikan layanan kesehatan, sanitasi, dan akses nutrisi yang lebih baik memainkan peran kunci dalam peningkatan AHH, yang mendukung dimensi kesehatan dalam IPM.

Sari et al. (2016) Penelitian yang dilakukan di seluruh provinsi Indonesia menunjukkan bahwa AHH dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM. AHH yang tinggi meningkatkan produktivitas masyarakat, sedangkan RLS mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Arisman (2018) Studi ini menemukan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui RLS dan Harapan Lama Sekolah (HLS) berdampak signifikan pada dimensi pendidikan dalam IPM. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Todaro & Smith (2006) Penelitian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkontribusi pada peningkatan standar hidup masyarakat. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, sehingga memperbaiki indikator IPM.

Bhakti et al. (2018) Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan AHH di Bali berkontribusi pada perbaikan IPM. Hal ini didukung oleh akses kesehatan yang lebih baik dan program pemerintah yang fokus pada layanan kesehatan masyarakat.

Frączkiewicz-Wronka et al. (2021) Studi ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan kesehatan di negara-negara berkembang berdampak signifikan pada peningkatan AHH, yang mendukung peningkatan IPM. Investasi pada layanan kesehatan preventif dan kuratif terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Banase & Purwono tentang pengeluaran pemerintah pada kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada Provinsi NTT menemukan bahwa Ditemukan hasil analisis lain bahwa pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan secara analisis parsial mempengaruhi indeks pembangunan manusia secara signifikan di kabupaten/kota pada provinsi NTT, tetapi pengeluaran untuk infrastruktur secara parsial tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia secara signifikan di kabupaten/kota pada provinsi NTT. Implikasi penelitian yang dapat diwujudkan ialah peningkatan pada kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pembangunan.

A. Budihardjo, Arianti, dan Mas'ud (2021) Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap PDRB Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018 menemukan bahwa secara parsial variabel investasi tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB, variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB, dan variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah selama periode penelitian. Sedangkan secara simultan variabel investasi, tenaga kerja, indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap laju pertumbuhan PDRB.